Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019)

Husni Mubarak[1], Azmir Salman[2],
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis
husnimubarak@polbeng.ac.id[1], azmirsalman46@gmail.com[2]

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness, contribution of Regional Original Income (PAD) to regional expenditures in Bengkalis Regency in 2017-2019. The focused research has been measuring effective level in using budget at Bengkalis city government at 2017 to 2019. This research is using quantitative method with descriptive analysis. Basis on descriptive is analysis emphasizes data objective phenomena and is analysis effective on result data research. The results of the study show that in 2017 the PAD realization was 72.78%, regional spending was 81.17% and the contribution rate was only 9.40%. in 2018 PAD realization was 71.83%, regional expenditure was 89.67% and the contribution rate increased to around 14.49%. in 2017 Realization of PAD decreased by 52.69%, regional spending 91.85% and the contribution rate of PAD decreased to 13.70%. This study shows the effectiveness of PAD Realization has decreased, while Regional Expenditure Realization has increased while the contribution only changed significantly from 2017 to 2018.

Keywords*: Local Revenue (PAD), Regional Expenditure*

1. PENDAHULUAN

Pesat dan majunya satu daerah ditentukan oleh system dan ketata kelolaan yang baik, serta didukung dengan keuangan yang baik pula. Otonomi daerah yang merupakan kewenangan daerah dalam pengelolaan pengaturan dan penentuan kebijakan perihal urusan pemerindah daerah itu sendiri serta diberi kewenangan mengelola kepentingan masyarakat seempat sesuai peraturan dan ketata laksanaan pada suatu daaerah tersebut. Pada prinsipnya Pelaksanaan otonomi daerah difokuskan bagi kebijakan penyelenggaran daerah pada tingkat kabupaten dan kota dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat kepada daerah (sularno 2013). Pernyataan diatas sebagai kalimat penegas bahwa kewenangan dalam menentukan alokasi pengelolaan sumber daya, manajemen pos pembelanjaan semuanya di kelola secara otonomi oleh pemerintah daerah dengan azaz kebutuhan, kepatuhan dan kewenangan yang di atur dalam anggaran belanja daerah.

Pada Undang-Undang (UU) No 33 tahun 2004 Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Menurut Kuncoro (2004) sumber dari PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi dan pungutan resmi lainnya serta Pendapatan dari Perusahaan milik Daerah. Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan dan belanja daerah yang sama besar dan setara nilia, keragaman daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadikan PAD suatu daerah tidak sama nilainya dan tidak memiliki kesamaan jumlah nya. Sehingga ketimpangan kemampuan daerah antara daerah yang memiliki kekayaan PAD sebagai wilayah yang tinggi hasilnya dan disisi liannya terdapat juga daerah tertinggal yang memiliki nilai kontribusi PAD yang rendah (Surakhman, dkk, 2019). Menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah,

dimana belanja daerah merupakan kewajiban yang timbul terhadap daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berjalan. Menurut nordiawan, dkk. (2012), belanja daerah dimaknai sebagai pengeluaran oleh bendahara umum daerah secara keseluruhannya mengurangi nilai entitas ekuitas lancer dalam tahun berjalan dan merupakan pengeluaran yang tidak diperoleh kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah ada 2 kelompok, belanja lansung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak lansung dan belanja lansung. Belanaj tidak lansung meliputi belanja bunga, subsidi, hibah, social, belanja bagi hasil daerah. Menurut Zebua (2014) bahwa belanaj daerah teralokasi secara sistematis dan terstrukutr ke pos-pos belanja untuk mendorong pertumbuhan pembangunan yang positif bagi masyarakat dan daerah untuk peningkatan kesejatheraan bersama. Dalam pengelolaan kinerja tersebut belanja daerah sangat tergantung pada sumber pendapatan yang di hasilkan dari masing-masing daerah.

Kabupaten Bengkalis ditahun 2019 untuk pendapatan daerah dari yang di anggarkan 3.592.811.949.632.660,- dan yang terealisasi atau terserapkan dalam belanja daerah sejumlah 3.300.015.421.822.490,-. Tingkat serapan senilia 91,85 persen. Kontribusi belanja daerah terbilang efektif. Sementara untuk PAD di tahun tersebut jumlah yang di realisasikan hanya sejumlah 226.245.884.000,- dari yang dianggarkan 429.370.673.000,- atau setara 52,69 persen. Kontribusi PAD terbilang kurang efektif. Informasi angka ini menjelaskan bahwa komponen utama belanja daerah yang seharusnya bersumber dari pendapatan asli daerah seharusnya berkontribusi lebih besar, namun kontribusi tersebut terukur sangat kecil dan terindikasi tidak berkontribusi baik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat sebuah analisis sederhana untuk mengukur tingkat kontribusi dan serapan angggaran dan belanja daerah, terutama mengukur tingkat pencapaian dan hasil output dari realisasinya.

Kecilnya tingkat kontribusi dan realisasi PAD dipandang perlu kiranya untuk menganalisisi sejauh mana peran dan kontribusi tersebut. Mengukur nilai kinerja yang dapat di capai dari keberadaan nya serta mengidentifikasi angka pencapian untuk mengalisis nilai tersebut sebagai sebuah indikasi kinerja dan keberhasilan pencaiaan. Selain itu perlu adanya sebuah telaah yang menganalisis nilia ukur kegagalan dan penyebab terjadinya nilia tersebut. Mengapa nilai tersebut hadir dan menjadi alasan kegagalan. Dengan ini peneliti memandang perlu sebuah analisis tentang PAD yang di katikan dengan Belanja daerah. Maka oleh karena itu judul penelitan ini adalah tentang **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019).**

Pada penelitan ini pembahasan yang angkat untuk mejadi bahan anaislis adalah: 1) Bagaimana tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019, 2) bagimana tingkat efektif realisasi Belanja Daerah tahun 2017 s/d 2019 di Kabupaten Bengkalis dan 3) seberapa besarkan tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjadi jawaban dari permasalahan diatas, mengukur tingkat Efektivitas PAD dan Belanja Daerah; kontribusi PAD pada belanja daerah; dan Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan PAD dan tingkat keberhasilan dalam pencapain belanja daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terhadulu

Pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Andri yulianto (2018) tentang Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk penelitian ini mengemukakan bahwa variable PAD, DAK, sangat berkontribusi dan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengelolaan keduanya memberikan energy positif untuk memabangun

daerah. Sementara untuk DAU dan Belanja Modal tidak memberi pengaruh terhadap konsep kemandirian pembangunan daerah.

Selanjutnya pada penelitian Sahala Purba, Gracesiela Yosephine Simanjuntak (2019) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Dan Jumlah Pendudu Terhadap Belanja Modal. Pada penelitan diatas menjelaskan bahwa secara Parsial DAU, PAD, Jumlah Penduduk, berpengaruh negative terhadap belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi dan SILPA tidak memberi pengaruh signifikan terhadap belanaj modal. Sementara uji simultan semuanya berpengaruh terhadap belanja modal.

Selanjutnya Ovina Mastiral, Nizwan Zukhri, dan Darman Saputra (2020) tentang Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian menjelaskan bahwa PAD di Belitung lebih baik dari pangkal pinang. Pertumbuhan pajak nya lebih rendah namun kontribusi yang di beri lebih besar di kota pangkal pinang. Kota Balitung kurang berhasil karena kontribusi pajak nya kurang walau pertumbuhan pajaknya lebih baik. Kontribusi kedua kota secara umum dinilai kurang baik dalam memberi sumbangan PAD ke masing-masing kabupatennya.

Pada penelitian Nabiyatun Nur Fatimah, dan Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti menemukan bahwa DAU memberi kontribusi positif signifkan terhadap Belanja Daerah. Sementara DAK dan DBH memberi pengaruh tidak signifikan kepada Belanja Daerah.

2.2 Landasan teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Kuncoro (2014), PAD adalah penghasilan daerah yang bersumber dari daerah tersebut sebagai modal dasar dalam membiayai aktifitas dan operasional serta pembanguan pada daerah tersebut, sebagai bentuk kemandirian bagi suatu daerah. Sementar sumber PAD bisa berasal dari Pajak, retribusi, dan pendapatan daerah melalui badan usaha milik daerah.

Berdasarkan UU no. 03 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pada bagian penjelasan PAD, sumber pendapatan bagi daerah berasal dari 4 jenis pendapatan diantaranya 1) pajak daerah sebagai pungutan resmi, 2) retribusi daerah melalui fasilitas daeah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 4) lain-lain pendapatan yang sah yang berhak di peroleh oleh daerah tersebut.

Belanja Daerah

Menurut UU no 33 Tahun 2004 menjelakan bahwa yang di maksud dengan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya kuncoro (2014) menambahkan bahwa belana daerah merupakan satu kesatuan organsisasi dari perangkat daerah baik dari secretariat daerah, dians-dinasi yang berada di daerah dan lembaga teknis lainnya milik daerah yang membelanjakan belanja derah untuk keaktifan fungsi organsiasi daerah tersebut.

Jenis Jenis belanja derah biasanya terdiri dari belanja rutin daerah dan belanaj lainnya baik belanja investasi, transfer daerah, belanja tidak terduga, dan belanja lainnya yang sah dari satu daerah tersebut. Pengelompokan Belanja Pemerintah dan daerah biasanya terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Belanja rutin sendiri adalah belana pengeluaran hanya untuk satu tahun anggaran yang manfaatnya dan tidak menambah kekayaan (asset) maupun kepemlikan (ekuitas) bagi daerah. belanja rutin rutin sendiri di kelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana umum.

Belanja investasi sendiri adalah belanja yang tujuannya untuk menambah aset atau kekayaan daerah, dimana konsep pengeluaran tersebut merupakan manfaat kegunaan melebihi satu tahun anggaran, menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya karena unsur pengadaan dan penggunaan dimasa depan. Adapun belanja investasi terdiri dari belanja publik dan belanja aparatur. Belanja Publik merupakan belanja yang secara lansung manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat daerah bersnagkutan. Sementara untuk belanja publik merupakan belanja investasi fisik memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun serta menimbulkan terjadinya penambahan asset daerah yang dikelompokkan kedalam belanja modal. Sementara belanja aparatur sendiri merupakan belanja yang dirasakan langsung oleh aparatur, dan manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Belanja aparatur selalunya memberikan manfaat pada periode berjalan dan bisa sampai pada periode yang akan datang.

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mengukur tingkat efektivitas, selalunya efektifitas dikaitkan dengan kesuksesan atau kegagalan terhadap pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi dari output dan proses dari analisis input data. Jika suatu Perusahaan memiliki karyawan yang cukup, bekerja tepat waktu, capaian produksi tercapai sesuai yang di rencanakan, program kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah tersusun dan yang telah dianggarkan maka perusahaan tersebut di nilia sebagai sesuatu yang sudah bekerjsa dengan efektif.

Menurut Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa kreteria untuk pengukuran efektif dapat di ukur dari pencapaian rasio antara ouput dengan input, dimana semakin besar nilai output dibanding input maka semakin tinggi tingkat pencapaian efektifitasnya. namun jika output berbanding input semakin rendah maka kinerja dan pencapaiannya terkategori tidak efektif.

Pengukuran efektif harus lebih terukur, detail dan spesifik. Untuk organisasi pemerintah dan publik, efektifitas biasanya berbanding lurus dengan indikator efisiensi sehingga dalam pengukuran penempatan dan penggunaan selalunya bisa di ukur searah dan lebih tepat pada capaian yang sangat effektif.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data di analisis dengan deskriptif kualitatif, dimana untuk pencapaian nilai dan indikator pengukuran tingkat efektifitas. Menurut Satori (2012) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu fonomean, objek, dan social seting dengan langkah kerja di jelaskan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Maksudnya bahwa data, fakta dihimpun dalam berbentuk gambar, tabel, atau kata berupa angka-angka. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar kontribusi PAD pada belanja daerah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Tahun 2017 s.d 2019. Perbandingan data yang di ambil adalah data sebelum covid 19, dengan alasan data tersebut tidak mengalami rasionalisasi (perubahan pengurangan anggaran). Subjek penelitian ini tentang mengukur tingkat efektifitas PAD dan Belanja Daerah dan Objek pada penelitian kali ini adalah variable realisasi Anggaran, Belanja dan PAD di tahun 2017, 2018, serta 2019.

Menurut sujarweni (2015) sebuah penelitian kualitatif yang baik memuatkan data primer dan sekunder. Untuk penelitian ini, Data Sekunder di peroleh dari data PAD dan Belanja Daerah berupa dokumen laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 s/d

2019. Data prime di peroleh melalui data aktif responden dari wawancara dan diskusi dengan kusioner yang disedikan terkait hasil data olah.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat efektifitas penggunaan dan serapan anggaran dilakukan dengan perbandinagan antara realisasi berbanding target untuk data dari tahun 2017 s/d 2019. Baik data Belanja daerah, PAD maupun pengukuran perbandingan capaian antara PAD dan Belanaj daerah. Untuk pengukuruan efektitias, tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, aebagai mana yang pernah di lakukan pada penelitan terdahulu oleh Ferina (2013). Adapun rumusnya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas keuangan dapat dilihat berdasarkan Pemendagri No. 690.900-327 tahun 1996 pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Keuangan

No	Efektivitas (%)	Keefektivan Keuangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber:Permendagri No. 690.900-327 tahun 1996

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Tingkat Efektivitas PAD di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

Tingkat efektifitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah setiap tahunnya. Pengukuran tingkat efektivitas bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan atau pencapaian sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan yang di proleh di banding target yang telah di tetapkan daerah. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai realisasi dengan anggaran. Analisis tingkat efektivitas PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019 dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2. Realisasi dan efektifitas Anggaran PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran PAD (Rp. 000)	Realisasi PAD (Rp. 000)	Efektivitas PAD (%)	Ketegori
2017	373.540.392	271.865.595	72,78	Kurang efektif
2018	444.510.450	319.280.511	71,83	Kurang efektif
2019	429.370.673	226.245.884	52,69	kurang efektif

Sumber: BPKAD kabupaten Bengkalis

Pada Tabel 2 di atas, data laopran realisasi PAD Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2017 tingkat rasio efektivitas PAD Kabupaten Bengkalis sebesar 72.28%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong kurang efektif karena berada di dalam kisaran kurang dari 100%. Hal ini mengambarkan pencapaian PAD tahun 2017 tidak mencapai target yang telah di tetapkan total anngaran PAD. Pada tahun 2018 rasio efektifitas Kabupaten Bengkalis menurun sebesar 0,95% dari tahun 2017 menjadi sebersar 71,83%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2018 berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong kurang efektif. Realisasi PAD Kabupaten Bengkalis tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2019 rasio efektifitas Kabupaten Bengkalis menurun

sebesar 19% dari tahun 2018 menjadi sebersar 52,69%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong kurang efektif.

Realisasi PAD Kabupaten Bengkalis tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan pajak pada rata rata yang beasr pajak dan restribusi jadi belom optimal jadi banyak taeget" yang belum bisa terpungut ,kita udah coba memumgut tapi hasilnya belum optimal, tak mengalami keuntungan contoh kita pungut pajak hotel hotel tidak mau bayar faktor permasalahnnya di lapangan makaya realisasi kita kurang efektif, pendapatan bengaklis bukan hanya dari PAD yang paling sedikit komposisinnya, namun PAD banyaknya dari pendapatan transfer.

4.2 Tingkat Efektif Realisasi Belanja daerah Vs. Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2019 di Kabupaten Bengkalis

Tingkat efektifitas diukur sebagai suatu indikasi dengan tujuan untuk mengetahui agar kinerja realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi kreteria dan standar efektif dalam mengunakan belanja daerah.Pengukuran tingkat efektif belanja daerah dapat dilihat melalui keberhasilan atau pencapaian tujuan anggaran sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. Untuk pengukuran Tingkat efektifitas belanja Kabupaten Bengkalis procedural nya dengan cara membandingkan antara nilai realisasi dengan anggaran. Analisis tingkat efektif belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019 dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019.

Tabel 3. Realisasi dan efektifitas Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran Belanja (Rp. 000)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp. 000)	Efektivitas (%)	Kategoti (%)
2017	3.972.064.330,00	3.223.329.257,00	81,17	Cukup Efektif
2018	3.006.809.696,00	2.749.997.146,00	89,67	Cukup Efektif
2019	3.592.811.949,00	3.300.015.421,00	91,85	Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel 3 dilihat selama periode anggaran tahun 2017 s/d 2019, bahwa untuk efektivitas anggaran belanja mengalami perubahan nilai dari tahun ke tahun nya. Perubahan nilia tersebut mengalami perubahan nilia konsisten perubahan positif dari cukup efektif sampai peningkatan yang efektif. Tahun 2017 kinerjanya cukup efektif yaitu 81,17%, berdasarkan rasio efektifitas anggaran tergolong cukup efektif, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 89,67%, berdasarkan rasio efektifitas anggaran tergolong cukup efektif, sampai pada tahun 2019 tingkat efektifitasnya meningkat sebesar 91,85% berdasarkan rasio efektifitas anggaran tergolong efektif.

Data di atas menjelaskan secara keseluruan tingkat efektifitas Belanja dari tahun 2017 s/d 2019, efektivitas untuk anggaran belanja Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan yang cukup efektif hingga efektif, tingkat efektivitasnya sudah bisa menunjukan efektif, Dengan demikian dapat di katakan bahwa efektifitas belanja daerah di Kabupaten Bengkalis dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya mencapai target output yang di harapkan. Hal ini menunjiukan bahwa Kabupaten Bengkalis selama tiga tahun terakhir sudah efektif dalam mengunakan anggaran yang telah di tetapkan, Kabupaten Bengkalis sudah cukup efektif dalam mengunakan anggaran belanja, anggaran belanja Kabupaten Bengkalis sudah di gunakan untuk melakukan belanja sudah cukup efektif terserap denagn maksimal

4.3 Kontribusi PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

Kontribusi PAD pada anggaran postur belanja daerah sangat menentukan sekali peran dan indikator variable pokok dalam mengukur kinerja otonomi daerah. Kontribusi tidak hanya berfokus pada penciptaan keseimbangan transaksi keuangan daerah jauh dari itu juga untuk tujuan mengetahui seberapa besar kontribusi PAD pada anggaran belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019. Berdasarkan data Realisasi pendapatan Daerah dan belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, dapat diketahui kontribusi PAD pada belanja Daerah sebagai berikut.

Tabel 4. Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2017-2019

Tahun	PAD (Rp. 000)	Belanja Daerah (Rp. 000)	Kontribusi PAD (%)
2017	373.540.392,-	3.972.064.330,-	9,40%
2018	444.510.450,-	3.066.809.696,-	14,49%
2019	429.370.673,-	3.592.819.496,-	13,70%

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi PAD pada belanja daerah Kabupaten Bengkalis selama 3 tahun terakhir sekitar 12, 53%. Hal ini bisa dibuktikan. Pada tahun 2017 PAD yang terpungut sekitar 9.40% kontribusi yang diterima. Selanjutnya pada tahun 2018 PAD mengalami peningkatan menjadi sekitar 14.49% kontribusi yang diterima. Selanjutnya pada tahun 2019 PAD mengalami penurunan menjadi 13,70% kontribusi PAD yang di terima. Data diatas dapat disimpukan bahwa dalam peniliaan perfektif kebutuhan bahwa pemerintah kabupanten bengkalis masih sangat tergantung kepada transfer pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah berbanding pengukuran pada tingkat kontribusi PAD yang merupakan pendapatan yang seharusnya berkontribusi besar dalam penciptaan keseimbangan transaksi pada pemenuhan belanja rumah tangga daerah.

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja darah pada tahun 2017 yaitu berkisar antara 72,28% yang hasil nya kurang efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami peningkatan yaitu berkisar 71,83% yaitu kurang efektif, dan pada tahun 2019 tingkat efektifitas mengalami penurunan yang berkisar 52,69 yaitu kurang efektif, Tingkat efektif PAD Kabupaten Bengkalis PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 di atas sangat efektif karena dengan biaya, rata-rata Laporan Biaya pemungutan PAD dan realisasi PAD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 0,71%.Artinya berdasarkan rata-rata Laporan biaya pemungutan PAD Realisasi Anggaran PAD Kabupaten Bengkalis dalam tiga tahun terakhir termasuk dalam kategori efektif. Penelitian tingkat efektivitas realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah naik turun pada tahun 2017 yaitu sekitar 81,17% dengan hasil efektif dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan tingkat efektif 89,67% dengan hasil efektif sedang kan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan tingkat efektif 89% dengan hasil tidak efektif.

Tingkat efektif PAD Kabupaten Bengkalis PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 di atas sangat efektif karena dengan biaya, rata-rata Laporan Biaya pemungutan PAD dan realisasi PAD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 0,71%.Artinya berdasarkan rata-rata Laporan biaya pemungutan PAD Realisasi Anggaran PAD Kabupaten Bengkalis dalam tiga tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 – 2019 mengalami

penurunan dan peningkatan tiap tahunnya dengan nilai 9,40%% untuk tahun 2017, 14,49% untuk tahun 2018, 13,70% untuk tahun 2019.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja darah pada tahun 2017 s.d 2019 dapat di ukur secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Realisasi PAD sebesar 72,78%, belanja daerah 81,17% dan tingkat kontribusi hanya 9,40%. pada tahun 2018 Realisasi PAD sebesar 71,83 %, belanja daerah 89,67 % dan tingkat kontribusi mengalami peningkatan menjadi sekitar 14,49%. Pada tahun 2017 Realisasi PAD turun sebesar 52,69 %, belanja daerah 91,85% dan tingkat kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 13,70%. Penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas Realisasi PAD mengalami Penurunan, sedangkan Realisasi Belanja Daerah mengalami Kenaikan sementara kontribusi hanya berubah signifikan dari tahun 2017 ke 2018. Dengan tingkat efektivitas PAD fluktuatif terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 mencerminkan kinerja PAD tidak berbanding Lurus dengan Kinerja Belanja daerah.

Selanjutnya Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih komperhensif untuk menjelaskan permasalahan dan bisa menggali informasi yang lebih tentative untuk penjelasan yang lebih mendalam terhadap perubahan baik tingkat kontribusi maupun efektifitas antara PAD dan Belanja Daerah. Mampu menjelaskan pos-pos akun yang mengalami perubahan signifikan dan menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut.

Saran penelitian ini untuk pelaku kepentingan dan pengguna dan pemanfaat informasi dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupenten Bengkalis, diharapkan agar lebih giat lagi dalam mengali potensi PAD untuk meningkatkan kontribusi dari tahun ke tahun terutama dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung dari Dana transfer oleh pemerintah pusat. Mampu memaksimalkan kebijakan dalam mengatur anggaran agar tidak terjadi penurunan terhadap efektifitas belanja daerah, agar bisa memanfaatkan anggaran yang telah di berikan pemerintah pusat untuk menggunakan nya secara efektif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Andri yulianto (2018) tentang Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Skripsi, Universitas Muhammadiah Surakarta

Gandhi Bangun Kuncoro (2014) Perbandingan Realisasi Dan Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Mendukung Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2013, skripsi, universitas sebelas maret, Surakarta

Jurnal, J. (2014) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi', *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2, pp. 63–70.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo (2004), otonomi dan manajemen KEUANGAN DAERAH, PenerbitAndi, Yogyakarta,

Nordiawan. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta

Nabiyatun Nur Fatimah, dan Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Equity Jurnal, Vol 22, No 2 (2019 http://dx.doi.org/10.34209/equ.v22i2.936

Purba, S., & Simanjuntak, G. (2019). pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pelaksanaan anggaran dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pada provinsi di indonesia. *jurnal ilmiah maksitek*, vol *4*, no 4, 83. Retrieved from https://makarioz. sciencemakarioz.org/ index.php/JIM /article/ view/108

Ovina Mastiral, Nizwan Zukhri, dan Darman Saputra (2020) tentang Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung. *journal of political* Vol 1, no 2, Januari 2020, pp. 115-124

sujarweni (2015) Metodologi Penelitian Bisnis, PustakaBaruPress, Yogyakarta,

Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisversitas Brawijaya.

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU no. 03 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Pemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, tentang pedoman penilaian kinerja keuangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),